

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KUMUH DI KAMPUNG HIJAU KECAMATAN
BANJARMASIN TIMUR OLEH
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Muhammad Fakhriza Irwani

NPP. 28.0937

*Jl. Ir. Soekarno KM. 20 , 45363, Indonesia
Asdaf Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan
Program Studi Pembangunan dan Pemberdayaan*

Email: fakhrizairwani@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement (GAP): *Kampung Hijau is one of the Banjarmasin City Government programs to overcome slum areas on the banks of the river. One of these slum areas is located in Kampung Hijau, East Banjarmasin District, which has been transformed into a tourist area but has not reached the expectations of the people of Banjarmasin City. Purpose:* The goal of this research is to describe empowerment and the steps taken by the Banjarmasin City Culture and Tourism Office to implement empowerment and overcome tourism problems and changes in slum areas in terms of human quality, business development, environmental preservation, and tourism institutions in Kampung Green. **Method:** *The descriptive method is combined with inductive qualitative writing in this study. The author employed semi-structured interviews with problem sketches, observations, and recording of data sources to obtain data. Data collecting, data reduction, data presentation, and generating conclusions are all approaches used in data analysis. Result:* The study's findings show that the government's role in this case, the Banjarmasin City Culture and Tourism Office, has been successful. **Conclusion:** *Slum community empowerment is being implemented through the green village program in accordance with the program's objectives as well as the decrease in slum areas caused by enhancing the quality of the Green Village Community in East Banjarmasin District, Banjarmasin City. However, there are still flaws, particularly in terms of local people' ideas and inventions, as well as environmental sites that are difficult to reach and reorganize, resulting in a stagnation of conditions in Kampung Hijau.*

Keywords: *Empowerment, Kampung Hijau, Slum Community*

ABSTRAK

Permasalahan: Kampung Hijau merupakan salah satu program Pemerintah Kota Banjarmasin untuk mengatasi kawasan kumuh di bantaran sungai. Salah satu kawasan kumuh tersebut berada di Kampung Hijau Kecamatan Banjarmasin Timur yang disulap menjadi kawasan wisata namun belum mencapai harapan dari masyarakat Kota Banjarmasin. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan pemberdayaan dan langkah-langkah yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin dalam pelaksanaan pemberdayaan dan mengatasi permasalahan pariwisata dan perubahan kawasan kumuh dari segi kualitas manusia, pembinaan terhadap usaha, pemeliharaan lingkungan, dan terhadap kelembagaan pariwisata yang berdiri pada Kampung Hijau. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan penulisan kualitatif induktif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah wawancara semi terstruktur dengan menggunakan garis-garis besar permasalahan, observasi, dan dokumentasi sumber data. Teknik analisis data dengan menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin telah

berjalan dengan baik. **Kesimpulan:** . Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kumuh melalui program kampung hijau ini berjalan sesuai dengan tujuan program kampung hijau itu sendiri serta menurunnya kawasan kumuh yang disebabkan oleh peningkatan kualitas dari Masyarakat Kampung Hijau di Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Namun penyebab obyek wisata Kampung Hijau masih ada kekurangan yaitu, mengenai inisiatif dan inovasi warga setempat dan lokasi lingkungan yang masih sulit diakses dan ditata kembali sehingga berdampak pada stagnasi kondisi di Kampung Hijau.

Kata Kunci : Pemberdayaan, Kampung Hijau, Masyarakat Kumuh

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kawasan kumuh biasanya terjadi dikarenakan tumbuhnya permukiman-permukiman akibat urbanisasi yang menimbulkan masalah-masalah sosial seperti permukiman kumuh. Perkembangan kota yang dinamis menjadi pusat dari kegiatan perekonomian, sehingga masyarakat lebih tertarik untuk memilih hijrah ke kota yang mana hal ini akan menyebabkan tingginya tingkat urbanisasi dan meledaknya angka penduduk yang tidak diimbangi dengan ketercukupan lahan pemukiman. Dampaknya sebagian masyarakat (masyarakat miskin) memilih menempati daerah yang tidak layak untuk ditempati, keterbatasan lahan perkotaan menyebabkan suatu kondisi kepadatan bangunan yang terus meningkat dengan arah persebaran yang tidak teratur. Hal ini akan memberikan tekanan pada daerah sekitarnya, terutama kawasan tepi air sungai atau lebih umum disebut dengan istilah bantaran sungai.

Pada umumnya masyarakat yang tinggal di bantaran sungai memanfaatkan lahan secara tidak terkoordinasi dan lepas dari pengawasan pemerintah yang menyebabkan tidak terkendalinya alih fungsi lahan jadi kawasan terbangun, yang membuat bantaran sungai tersebut menjadi lahan yang tidak sesuai di sepanjang bagian tepi sungai. Hal ini menyebabkan lingkungan bantaran sungai terlihat kumuh dengan bangunan yang tidak beraturan tanpa fasilitas seperti rumah pada umumnya. Kawasan kumuh biasanya menjadi bagian terabaikan dalam pembangunan kota, ditunjukkan dengan kondisi sosial demografis di kawasan kumuh seperti kepadatan penduduk yang tinggi, rumah tidak layak huni dan kurangnya fasilitas dasar yang bersifat umum sehingga membentuk masyarakat yang tidak mempunyai rasa kepedulian akan lingkungannya. Masyarakat yang tinggal di lingkungan seperti itu identik dikenal sebagai masyarakat kumuh.

Secara umum masyarakat kumuh akan berpengaruh terhadap keindahan suatu kota dan menyebabkan lingkungan kotor yang akan mengganggu aktivitas kota. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menjelaskan perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

Kondisi alam menjadikan suatu wilayah memiliki keunggulan tersendiri untuk dapat dikembangkan, namun terlepas dari itu juga memiliki permasalahan-permasalahan dibalikinya. Kota Banjarmasin dinilai sebagai salah satu kota dengan tingkat kumuh yang tinggi. Hasil identifikasi kawasan kumuh di Kota Banjarmasin tercantum dalam Surat Keputusan Walikota Nomor 460 Tahun 2015 tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh Kota Banjarmasin. Maka dari itu pemerintah melalui program Kotaku (Kota tanpa kumuh) berupaya membenahi kawasan kumuh di Banjarmasin salah satunya dengan memanfaatkan kawasan yang tadinya kumuh menjadi kawasan tertata sebagai destinasi wisata. Kota yang berjuluk Kota Seribu Sungai ini menawarkan potensi tujuan wisata berbasis sungai dengan keunikan yang identik berupa kondisi alam dan kehidupan masyarakatnya.

Kampung Hijau merupakan salah satu obyek wisata di Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Sesuai namanya, Obyek Wisata Kampung Hijau ini merupakan wisata yang awalnya merupakan perkampungan kumuh di bantaran sungai Martapura yang ditata kembali oleh pemerintah daerah pada tahun 2017 dan dijadikan destinasi wisata yang bertujuan untuk mendukung program kotaku (kota tanpa kumuh). Permukiman tepi sungai di Kota Banjarmasin merupakan permukiman dengan kehidupan sungai dan ciri budaya tersendiri, namun pada kenyataannya permukiman tepi sungai mengakibatkan terbentuknya Kota Banjarmasin berkembang secara tidak terkendali.

Untuk meningkatkan kualitas masyarakat Kampung Hijau, maka pemerintah daerah melalui Surat Keputusan Peraturan Walikota no. 25 tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wisata berbasis sungai pasal 2 ayat 2 yang berbunyi “pengelolaan dan pengembangan wisata berbasis sungai memiliki tujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan serta membuka peluang usaha dan meningkatkan perekonomian masyarakat” menjadikan Kampung Hijau menjadi salah panorama menarik sekaligus tujuan dari wisata susur sungai di Kota Banjarmasin yang akan berdampak pada perekonomian masyarakat lokal sekitar. Pemerintah membenahi kawasan kumuh tersebut dengan memberdayakan masyarakat kumuh di sekitar Kampung Hijau agar mampu mandiri dan membantu perkembangan pariwisata di Kota Banjarmasin.

1.2. Permasalahan

Ada beberapa permasalahan yang menjadi hambatan berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat kumuh di Kampung Hijau Kecamatan Banjarmasin Timur ini. Adapun yang menjadi hambatan dalam pengembangan obyek wisata Kampung Hijau yaitu kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang pentingnya pariwisata dalam peningkatan ekonomi kerakyatan, kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengembangkan obyek wisata, fasilitas umum yang kurang dijaga sehingga menyebabkan banyak kerusakan, kurang kreativitas dilihat dari masyarakat yang selalu menunggu pemerintah untuk mengembangkan obyek wisata, karakter masyarakat yang terbiasa dimanjakan oleh alam. Terlebih lagi manajemen organisasi yang tidak maksimal dalam pengelolaannya dan juga dampak perilaku masyarakat kumuh seperti membiarkan kawasan wisata terbengkalai dan sampah yang tidak diperhatikan pada lingkungannya sewaktu-waktu bisa mengembalikan citra Kampung Hijau menjadi permukiman kumuh kembali.

Faktor individu merupakan salah satunya dan mendasar. Hal yang masih menjadi kendala yaitu kesadaran akan masyarakatnya untuk mampu mengembangkan dan menyesuaikan dengan kegiatan sebagai tuan rumah dari destinasi wisata Kampung Hijau. Faktor kebiasaan dan budaya yang masih lambat berubah dalam menyambut Kampung Hijau sebagai destinasi wisata sehingga berdampak terhadap perkembangan Kampung Hijau yang tergolong masih stagnan. Hal ini menunjukkan bagaimana kemampuan keberdayaan suatu individu atau kelompok terhadap perkembangan Kampung Hijau sehingga perlunya diadakan pemberdayaan. Sebagaimana menurut Mardikanto (2017:61) menjelaskan “pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat atau mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan atau keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan”.

1.3. Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pemberdayaan masyarakat maupun konteks kegiatan pariwisata serta kampung tematik. Kondisi permukiman di tepian sungai Kota Banjarmasin yang sudah tidak terkendali menjadikan sebagai kawasan kumuh (Yubiar, 2017). Hampir seluruh kawasan tepian sungai di setiap kelurahan

dikategorikan sebagai kawasan kumuh sehingga kawasan tepian sungai yang sebenarnya dapat menjadi aset Kota Banjarmasin, sebaliknya menjadi wajah buruk bagi Kota. Penelitian Konsep Penataan Permukiman Kumuh Tepian Sungai di Kelurahan Sungai Bilu Kota Banjarmasin (Rahman, S., Mentayani, I., Rusmilyansari., Mahreda, E. S.2019), menemukan bahwa karakteristik permukiman kumuh tepian sungai Kelurahan Sungai Bilu dapat dilihat dari dua aspek yaitu aspek fisik dan nonfisik. Aspek fisik yaitu bangunan hunian dan sebagainya dan non fisik meliputi status ekonomi rumah tangga, mata pencaharian, tingkat pendidikan dan lainnya. Penelitian oleh Rahman dkk pada tahun 2019 mengidentifikasi bagaimana potensi dan masalah dari kondisi permukiman kumuh di Kampung Hijau sekaligus menjadi tolak ukur potensi wilayah. Hal ini menjadi dasar dalam perubahan kawasan kumuh tersebut menjadi sebuah kawasan bantaran sungai yang tertata rapi sebagaimana program KOTAKU (kota tanpa kumuh) hingga mampu dijadikan destinasi wisata seperti sekarang.

Program Kampung Hijau mampu berkembang jika diiringi dengan berkembangnya kualitas penduduk yang berdaya dan mandiri. Sehingga menurut Walbertus (2019) “hal pertama yang menjadi dasar dalam pemberdayaan masyarakat adalah mengidentifikasi potensi.” Adapun beberapa strategi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di wilayah Jodipan, Malang dalam menjadikannya sebagai destinasi wisata, diantaranya akses tidak tertutup, partisipasi masyarakat yang aktif, kesempatan kontrol dan pemanfaatan sumber daya yang sama antara pemerintah, masyarakat, atau komunitas, manfaat dari suatu pembangunan. Dari hal tersebut akan meningkatkan kualitas masyarakatnya sehingga berdampak terhadap berkembangnya destinasi wisata.

Penelitian ini juga melihat bagaimana kurangnya inovasi dan keaktifan masyarakat dalam memberdayakan Kampung Hijau. Sehingga hal itu menjadi sebuah permasalahan hingga terlihat perkembangan Kampung Hijau yang relatif diam di tempat. Jika dibandingkan dari inovasi yang digagas dalam Kampung Tematik di Kota Semarang dalam studi kasus: Kampung Sehat Ramah Anak yaitu mampu melibatkan masyarakatnya keseluruhan dalam mengelola kampung tematik tersebut. dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam program-program dari para aktor. Masyarakat sangat senang wilayahnya diperhatikan oleh pemerintah, walaupun masih ada warga yang belum berpartisipasi penuh, dan untuk meningkatkan partisipasi tentunya membutuhkan waktu tetapi masyarakat sudah bisa menerima adanya inovasi-inovasi baru di wilayahnya.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, penulis melihat bagaimana kondisi Kampung Hijau yang belum mampu berdiri sebagaimana harapan dari Pemerintah Kota Banjarmasin serta masyarakat Kota Banjarmasin. Sehingga perlu kiranya diketahui bagaimana pemberdayaan yang dilakukan dan kondisi langsung Kampung Hijau saat ini dan program-programnya.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Hal yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni pemberdayaan masyarakat kumuh di Kampung Hijau Kecamatan Banjarmasin Timur oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, menggunakan indikator dimensi yang berbeda juga dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Mardikanto (Mardikanto, 2017) yang menyatakan bahwa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang menjadi tujuannya adalah tri bina yaitu bina manusia, bina usaha dan bina lingkungan. Sementara itu Mardikanto (2003) menambahkan satu lagi bina yaitu bina kelembagaan, karena terwujudnya yang diharapkan ketika didukung efektivitas kelembagaan.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai pemberdayaan masyarakat kumuh di Kampung Hijau Kecamatan Banjarmasin Timur oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.

II. METODE

Desain yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Sumber data pada penelitian ini berasal dari beberapa informan yakni berjumlah total sebanyak 15 orang. Informan tersebut terdiri dari Sekretaris Dinas, Kepala Seksi Penataan Lingkungan Wisata, Camat, Lurah, Pokdarwis, Pelaku Usaha, Masyarakat serta data primer dan sekunder yang penulis kumpulkan di lapangan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah menggunakan wawancara semi terstruktur yang mana penulis akan mengembangkan pedoman wawancara yang telah dikembangkan sebelumnya untuk mendapatkan data yang lebih luas berdasarkan dengan konteks perkembangan di lapangan. Observasi dilakukan penulis yaitu dengan melakukan observasi partisipatif dengan mengamati, mencatat dan menganalisis data-data yang diperlukan. Penulis secara partisipatif menyatakan kegiatan di lapangan yang dilakukan tujuan penulis untuk hadir langsung ke lapangan dalam beberapa kesempatan guna memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan. Dan juga mengamati dokumentasi-dokumentasi yang berbentuk tulisan seperti peraturan daerah, surat, arsip dan penulis juga mengambil gambar dalam bentuk foto sebagai bukti fisik pelaksanaan penelitian di lapangan serta melakukan pengujian sumber dalam pelaksanaan teknis analisis data untuk menguji hasil penelitian. Selanjutnya, penulis juga menggunakan teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan seperti yang dijelaskan Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (Sugiyono, 2019, p. 322).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pemberdayaan Masyarakat Kumuh di Kampung Hijau Kecamatan Banjarmasin Timur

Pemberdayaan dilakukan berdasarkan indikator-indikator yang telah dimuat pada operasionalisasi fokus magang. Indikator-indikator tersebut menjadi penunjang terhadap penelitian yang dilakukan penulis di lapangan. Dalam hal ini indikator-indikator diklasifikasikan berdasarkan teori Mardikanto melalui 3 dimensi yakni bina manusia, bina usaha, dan bina lingkungan diselaraskan dengan implementasi kegiatan dinas kebudayaan dan pariwisata diuraikan dalam Perwali Kota Banjarmasin Nomor 125 Tahun 2016 ayat (2). Sesuai dengan peraturan daerah tersebut, pemerintah memiliki tujuan untuk memperbaharui kawasan kumuh di bantaran sungai sekaligus menobatkan sebagai obyek wisata berbasis sungai yang pada tujuan akhirnya adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan melalui program pengembangan wilayah pariwisata di Kota Banjarmasin.

Berbagai program banyak dilaksanakan dengan harapan masyarakat mampu keluar dari permasalahan-permasalahan yang membuat wilayah tersebut dijuluki kawasan kumuh. Tentu ketika kalangan masyarakat kumuh ini mampu berdaya, maka akan menjadi sebuah peradaban baru dari predikat buruk dari wilayah tersebut. Adapun kegiatan yang pernah berlangsung di Kampung Hijau dari tahun 2018-2020 sebagai berikut:

Tabel 1
Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM di Kampung Hijau oleh Pemerintah Kota Banjarmasin pada Tahun 2018-2019

No	Nama Kegiatan	Wujud Pelaksanaan	Pelaksana
1	Bimbingan Teknis Peningkatan SDM di Kampung Hijau, Kecamatan Banjarmasin Timur	Penyuluhan secara berjenjang, sosialisasi, serta penanaman nilai sapta pesona dengan tujuan untuk merubah karakter kumuh pada masyarakat Kampung Hijau	Camat Banjarmasin Timur, Lurah Sungai Bilu, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin
2	Peningkatan kapasitas usaha masyarakat di bidang UMKM masyarakat di Kampung Hijau	Dalam kegiatan diklat peningkatan kapasitas usaha kerupuk bagi masyarakat Kampung Hijau ini, diikuti pelaku usaha dan berlangsung di BDI Makassar, Sulawesi Selatan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin
3.	Program Wirausaha Baru	Pelatihan dan pengembangan pelaku usaha mikro dan kecil pada kawasan wisata dalam program Wirausaha Baru (WUB). Peserta pelatihan sebagian besar adalah pengusaha kerupuk.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin
4.	Daur ulang sampah	Pelatihan daur ulang sampah dengan target masyarakat kumuh di Kampung Hijau menjadi industri kreatif penunjang wisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin bersama aktivis peduli lingkungan
5.	Program Tanaman Obat Keluarga (TOGA)	Masyarakat kumuh di Kampung Hijau menerima penyuluhan mengenai Tanaman Obat Keluarga (TOGA) selama 1 bulan sekali	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin

Sumber : Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Banjarmasin

Berdasarkan tabel diatas, Pemerintah Kota Banjarmasin telah melakukan beragam kegiatan dalam memberdayakan masyarakat kumuh Di Kampung Hijau yang mana dalam proses perjalanannya melibatkan berbagai unsur guna memenuhi harapan yang dicanangkan walaupun tanggung jawab dilimpahkan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin sebagai pembina kawasan wisata di kota berjuluk Seribu Sungai tersebut. Melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang digalakkan Pemerintah Kota Banjarmasin sedikit demi sedikit banyak kemajuan dan perubahan dari karakter masyarakat kumuh di Kampung Hijau kearah yang lebih baik sejalan dengan perkembangan zaman.

A. Bina Manusia

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kampung Hijau yang dilakukan oleh pemerintah, dilakukan bina manusia yang mana seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas individu atau masyarakat agar dapat mandiri serta mampu menyanggah gelar Kampung Hijau sebagai salah satu destinasi wisata sehingga tercapainya perbaikan kualitas hidup untuk mencapai kesejahteraan. Upaya yang selama ini dilakukan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Banjarmasin dalam memberdayakan masyarakat kumuh di Kampung Hijau dengan perbaikan serta penguatan kapasitas. Seperti berdasarkan teori Mardikanto (2017:111-112) meliputi:

1. Perbaikan Pendidikan
2. Perbaikan Aksesibilitas
3. Perbaikan Tindakan
4. Perbaikan Kelembagaan
5. Perbaikan Usaha
6. Perbaikan Pendapatan
7. Perbaikan Lingkungan
8. Perbaikan Kehidupan
9. Perbaikan Masyarakat

Pemberdayaan yang dilakukan pada masyarakat kumuh di Kampung Hijau adalah pada pengembangan kapasitas individu dari berbagai latar belakang yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat disana. Beragam upaya dan kegiatan telah dilakukan yang dapat mendukung peningkatan dan pengembangan kapasitas (mutu) Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat di Kampung Hijau melalui kegiatan studi banding, bimbingan teknis dan pelatihan, serta sosialisasi secara langsung.

Berdasarkan dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, pada pasal 8 ayat (1) tercantum kewajiban pemerintah daerah dilakukan pada tahap:

- a. Pengawasan dan pengendalian
- b. Pemberdayaan masyarakat

Adapun kewajiban lainnya yang terdapat dalam pasal 8 ayat (3) pada tahap pemberdayaan masyarakat meliputi:

- a. Memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh, melalui penyuluhan, pembimbingan, dan bantuan teknis.
- b. Memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat mengenai rencana tata ruang, perizinan, dan standar teknis perumahan dan permukiman serta pemberitaan hal-hal terkait upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Sebagaimana peraturan di atas serta observasi dan wawancara di lapangan, penulis

menyimpulkan bahwa pemerintah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin telah memberdayakan masyarakat kumuh di Kampung Hijau bersinergi dengan Camat Banjarmasin Timur, Lurah Sungai Bilu, dan unsur penting lainnya melalui bimbingan teknis, pelatihan, edukasi meliputi pembekalan mengenai manajemen, peluang usaha, potensi wilayah, produksi, pemasaran serta studi banding. Masyarakat Kumuh di Kampung Hijau sangat terbantu oleh kegiatan-kegiatan tersebut untuk belajar meningkatkan keberdayaan mereka dalam menghadapi status destinasi wisata Kampung Hijau sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat kumuh di Kampung Hijau. Namun berjalannya kegiatan pemberdayaan masyarakat kumuh yang dilakukan, masih belum optimal dan harus tetap dikembangkan secara konstan dan terus diperhatikan agar tumbuh suatu pembangunan yang berkelanjutan.

B. Bina Usaha

Sebagaimana pada pasal (1) ayat (20) dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2013-2028 disebutkan bahwa “pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan pariwisata”. Dan juga dijelaskan pada pasal (2) ayat (7) mengenai sasaran pembangunan destinasi pariwisata dijelaskan mengenai mewujudkan pemberdayaan masyarakat dibidang pariwisata melalui program pemberdayaan dan kemitraan usaha. Dalam Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wisata Berbasis Sungai pada pasal (10) ayat (2) meliputi huruf:

- (b) Pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan usaha pariwisata
- (c) Pembinaan teknis penyelenggaraan usaha pariwisata
- (e) Pembinaan teknis pemasaran/promosi

Pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan usaha pariwisata yang dimaksud dalam konteks ini adalah dalam pelaksanaan usaha pariwisata pemerintah Kota Banjarmasin dalam waktu berjenjang melaksanakan pengendalian dan pengawasan bagi pelaku usaha masyarakat kumuh di Kampung Hijau. Dalam pelaksanaannya ditentukan berdasarkan potensi yang dimiliki masyarakat di Kampung Hijau. Jenis kegiatan yang diberikan dapat berupa pelatihan, sosialisasi, demonstrasi bersinergi dengan pihak yang berkompeten di bidangnya. Tujuan dari adanya pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan usaha pariwisata adalah agar usaha yang dilaksanakan masyarakat dapat terorganisir dengan baik guna meningkatkan produktivitas usaha, meningkatkan efisiensi serta estetika lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat kumuh di Kampung Hijau, dan untuk meminimalisir permasalahan dalam kegiatan produksi.

Beberapa hal yang menjadi indikator bina usaha dalam pemberdayaan masyarakat kumuh di Kampung Hijau, sebagai berikut:

1. Pengelolaan SDM dan penyelenggaraan usaha pariwisata

Pengelolaan SDM dilakukan dengan pembinaan teknis penyelenggaraan usaha pariwisata, yakni seperti mengembangkan skill, kemampuan serta pengetahuan bagi masyarakat kumuh di Kampung Hijau. Hal yang berkaitan dengan Bina Usaha yang dilakukan di Kampung Hijau, pelaku usaha mendapatkan izin usaha dan alat bantu. Sedangkan hal untuk peningkatan kualitas seperti pelatihan dan sosialisasi tergolong sangat minim. Sosialisasi dan pelatihan lebih banyak mengarah pada pembinaan terhadap karakter masyarakat di Kampung Hijau. Pembinaan terhadap usaha lainnya juga belum ada sejauh ini baik itu berdasarkan keahlian masyarakat maupun keahlian baru.

2. Peningkatan Teknik Produksi Industri Rumah

Pelaku usaha industri rumah tangga yang banyak didapati di Kampung Hijau adalah pengrajin kerupuk udang yang telah berproduksi dari sebelum adanya program Kampung Hijau. Peningkatan sistem dan teknik produksi bisa dilihat dari teknologi yang digunakan sudah menggunakan peralatan yang modern seperti pada pengrajin kerupuk. Dimana dalam produksinya memanfaatkan alat bantuan pemberian dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin berupa pendingin makanan (*freezer*), alat pemotong, dan blender. Perbaikan-perbaikan fasilitas lapak jualan juga menjadikan tempat pelaku usaha lebih rapi dan tertata.

3. Peningkatan Pemasaran dan Promosi

Secara umum pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kumuh di Kampung Hijau selain untuk memperbaiki tata ruang kota, juga untuk menarik wisatawan berkunjung ke Kampung Hijau. Kebanyakan orang yang berkunjung ke Kota Banjarmasin didominasi oleh orang-orang yang memiliki tujuan bisnis. Pengembangan pariwisata masih terus dilakukan berdasarkan kekuatan potensi lokal dan keunikan setiap objeknya. Guna memenuhi pertumbuhan kawasan pariwisata memerlukan nilai kreativitas mengemas dan memasarkan produk unggulan wisata dengan unsur khas serta ketersediaan sarana dan prasarana, bisa dari sisi budaya, fasilitas seperti transportasi, promosi dan pemasaran. Selama ini Kota Banjarmasin banyak berupaya memasarkan pariwisatanya seperti melalui akses informasi pariwisata di Bandara Syamsudin noor, aplikasi android, sosial media, dan himbauan di lokasi strategis.

4. Peningkatan aksesibilitas SDM

Peningkatan aksesibilitas SDM sangat diperlukan mengingat motivasi, semangat juang, dan pola pikir yang harus berjalan seimbang perlu dilakukan agar Kampung Hijau mampu mengangkat derajat hidup manusianya menjadi manusia yang berdaya dan berkembang hingga mampu hidup sejahtera dan mandiri.

Dalam bina usaha yang melingkupi 4 indikator sebagaimana diatas menjadi indikator-indikator yang ditelaah penulis selama berada di lapangan. Hal ini diselaraskan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wisata Berbasis Sungai sebagaimana pasal 10 ayat (2) mengenai pembinaan yang dilakukan oleh OPD meliputi:

- a. Pemberian izin usaha pariwisata
- b. Pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan usaha pariwisata
- c. Pembinaan teknis penyelenggaraan usaha pariwisata
- d. Pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata
- e. Pembinaan teknis pemasaran/promosi
- f. Pemberian penghargaan bagi usaha dan tenaga kerja yang berprestasi.

Maka banyak hal pembinaan dan pemberdayaan dalam bina usaha yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banjarmasin khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum pada Perwali diatas dan diperjelas pada Peraturan Walikota Nomor 128 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin. Namun dibalik semua yang dilaksanakan masih beberapa yang sebaliknya belum terlaksanakan. Sebagian lainnya masih belum berjalan maksimal.

C. Bina Lingkungan

Lingkungan menjadi faktor utama menariknya sebuah pariwisata. Kebanyakan giat pariwisata adalah untuk menikmati keindahan alam dan budaya, yang mana pada dasarnya nilai estetika dari suatu lingkungan menjadi kenyamanan bagi seluruh masyarakat lokal maupun wisatawan serta

akan menjadi nilai lebih bagi tempat pariwisata. Menurut Mardikanto (2017) Bina lingkungan yaitu “harus memperhatikan dampak negatifnya”. Hal ini terjadi mengingat pentingnya keseimbangan alam yang semestinya terjaga. Menurut Mardikanto (2017: 111–112) tujuan pemberdayaan meliputi “beragam upaya perbaikan, salah satunya adalah perbaikan lingkungan. Perbaikan lingkungan bisa meliputi fisik dan sosial karena kerusakan lingkungan biasanya dampak dari kemiskinan dan keterbatasan pendapatan.” Maka dari itu pemberdayaan juga melingkupi aspek lingkungan.

a. Pengembangan Sarana dan Prasarana

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin telah banyak melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana dengan wujud pengembangan fasilitas-fasilitas guna menaikkan inisiatif penduduk sekitar. Selain dari itu awal mulanya Kampung Hijau hanyalah permukiman kumuh di bantaran Sungai Martapura dengan segala kehidupan masyarakatnya yang masih terdapat banyak permasalahan sosial. Hingga kini Kampung Hijau disulap oleh pemerintah Kota Banjarmasin diperantarai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Banjarmasin dengan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh). Seiring berkembangnya Kampung Hijau, pemerintah juga ingin menjadikan Kampung Hijau sebagai tempat wisata sehingga diberikan fasilitas untuk menunjang pariwisata.

Beragam fasilitas umum telah diberikan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin. Hanya saja perlu kiranya produksi dari masyarakat Kampung Hijau sendiri yang perlu ditingkatkan guna mengembangkan daya tarik pariwisata Kampung Hijau.

b. Pembinaan Kesadaran Masyarakat

Pemerintah setempat melakukan berbagai pembinaan dari tingkat kecamatan, kelurahan, dinas-dinas, serta lembaga non pemerintah. Kesadaran masyarakat menjadi tujuan utama dari pemerintah untuk dilakukan pembinaan mengingat lingkungan yang dulunya terkesan kumuh ini masih memiliki *mindset* yang tertutup terhadap pendatang baru. Pemberdayaan masyarakat dalam konteks pembinaan kesadaran masyarakat merupakan faktor yang sangat besar terhadap kemajuan masyarakat dan pariwisatanya. Terbukti hingga sekarang menjadi kendala yang besar untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat sebagai penunjang wisata baik kesadaran akan lingkungan yang bersifat fisik ataupun yang bersifat non-fisik.

c. Penataan Tempat Usaha dan Pariwisata

Penataan terhadap tempat usaha dan pariwisata biasanya dilakukan guna menambah nilai estetika dan menghindari kesemrawutan lingkungan pariwisata. Pemerintah Kota Banjarmasin belum melakukan penataan tempat usaha secara menyeluruh. Dilain hal berkaitan dengan tempat usaha tidak dilakukan penataan, sehingga dibiarkan memanfaatkan ruang yang tersedia. Sampai saat ini penataan tempat usaha dibiarkan mengalir seperti biasa terkecuali akhir pekan yang biasanya ramai terhadap kunjungan wisatawan.

D. Bina Kelembagaan

Pembentukan program Kampung Hijau sebagai destinasi wisata juga sekaligus membentuk sebuah organisasi Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) yang mana memiliki tugas sebagai sekelompok orang yang bertujuan sebagai penggerak dan pelopor kepariwisataan di Kampung Hijau dan sekaligus sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Kota Banjarmasin. Pokdarwis sebagai wadah yang memfokuskan dirinya terhadap kemajuan pariwisata yang mana personilnya dilatarbelakangi oleh orang-orang yang tinggal di sekitar kawasan wisata tersebut.

Pada dimensi ini, penulis memfokuskan kepada manajemen organisasi pariwisata. Kondisi perkembangan Kampung Hijau sedikit banyak sangat dipengaruhi oleh Pokdarwis Kampung Hijau. Namun, hanya saja Pokdarwis masih minim dari harapan Pemerintah Kota Banjarmasin. Menurut penulis dasar yang membentuk organisasi ini berdiri belum kokoh, terlihat dari

keseriusan pengurus inti dalam menangani Kampung Hijau. Sehingga hal ini berpengaruh terhadap manajemen yang berjalan tidak terstruktur dengan baik. Tujuan akhir dari dibentuknya Pokdarwis yaitu sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam membina, membantu, serta memberdayakan masyarakat kumuh di Kampung Hijau.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Program Kampung Hijau memberikan banyak dampak positif di berbagai lapisan masyarakat dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri dan kawasan tertata rapi. Kampung Hijau juga merupakan salah satu bukti keseriusan pemerintah dalam membenahi kawasan kumuh di Kota Banjarmasin serta pemanfaatan potensi untuk dikembangkan. Penulis menemukan temuan penting yakni potensi yang luar biasa yang mana bantaran sungai yang dulunya dianggap sepele bahkan bantaran sungai dan sungai sempit menjadi sebagai kendala dalam pembangunan Kota Banjarmasin, mampu menjadi sebuah potensi besar dalam perkembangan suatu kota bahkan bisa menjadi suatu keunggulan dibandingkan wilayah lainnya. Dalam memanfaatkan potensi tersebut serta menekan angka kawasan kumuh di Kota Banjarmasin maka melalui program KOTAKU (kota tanpa kumuh) diperbaharuilah bantaran sungai sepanjang Kelurahan Sungai Bilu. Karena keindahan panorama alamnya Pemerintah Kota Banjarmasin berupaya menjadikan Kampung Hijau sebagai kawasan wisata yang nantinya akan berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat Kampung Hijau. Namun tak semudah yang diharapkan kondisi Kampung Hijau cukup berkembang namun masih tergolong pelan dikarenakan permasalahan-permasalahan di dalamnya termasuk kesadaran masyarakatnya dalam mengelola wilayah ini. Sehingga menjadi sebuah ketertarikan tentang bagaimana pemberdayaan yang dilakukan serta langkah lanjutan dari Pemerintah dalam menata wilayah Kampung Hijau tidak hanya berdasarkan pada aspek fisik saja tetapi juga menyentuh aspek non fisik secara utuh dan paripurna.

Layaknya program lainnya, Kampung Hijau masih memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah pemanfaatan digital media sebagai sarana informasi dan pemasaran, faktor kualitas individunya, sarana fasilitas yang masih belum mampu memenuhi kebutuhannya serta manajemen organisasinya yang masih belum berjalan dengan baik.

Adanya program ini juga diharapkan secara jangka panjang mampu menghilangkan kawasan kumuh di Kota Banjarmasin, menumbuhkan perekonomian masyarakat, dan juga meningkatkan angka harapan hidup di Kota Banjarmasin.

4.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat pemberdayaan masyarakat kumuh di Kampung Hijau Kecamatan Banjarmasin ini yakni kapasitas individu para masyarakat, tingkat kesadaran yang masih rendah, penataan lingkungan, tidak adanya penataan tempat usaha, kurangnya promosi dan pemasaran, dan kurangnya sarana dan prasarana (fasilitas) pendukung.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penulis dapat disimpulkan bahwa upaya pemberdayaan yang dilakukan berdasarkan konsep pemberdayaan teori Mardikanto (2017) tentang 3 bina yang menjadi dasar yaitu bina manusia, bina usaha, dan bina lingkungan, serta ditambah lagi oleh Mardikanto (2003) yaitu bina kelembagaan dalam pemberdayaan dinilai belum maksimal, karena terhambat beberapa faktor seperti fasilitas yang masih terbatas, kapasitas kompetensi dan pola pikir manusianya yang masih kurang, pemberdayaan terhadap pelaku usaha yang masih minim, dan manajemen organisasi Pokdarwisnya yang masih belum sesuai harapan.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin harus mulai memperhatikan kebijakan dan pelaksanaan program yang telah dibuat hendaknya dilakukan dengan baik dan didukung berbagai unsur. Hal ini juga harus ditunjang dengan keadaan yang berkelanjutan (*sustainable*). Karena untuk membangun sesuatu hal sudah seharusnya dilakukan secara tekun dan ulet agar terus berkembang.

Pada bagian ini menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran perbaikan untuk penelitian lanjutan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kelurahan atau satu wilayah saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Creswell.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program Kampung Hijau di Kota Banjarmasin untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, O. M. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Mardikanto, T. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mardikanto, T., & Soebianto, P. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat* (Februari 2). Bandung: Alfabeta.
- Maryani, D., & Nainggolan, R. R. E. (2018). *Pemberdayaan Masyarakat*. Buku Literatur IPDN Tahun 2018.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan* (Mei 2017). Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, S. (2004). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sutopo (ed.); ke-1). Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2017). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial* (A. Gunarsa (ed.)). Bandung: Refika Aditama.
- Suhendra, K. (2006). *Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Normelani dkk. (2020). *Program Kampung Iklim Tinjauan Persepsi Masyarakat Kota Banjarmasin*. Banjarmasin: Lambung Mangkurat University Press.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2013-2028

- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2013-2023
- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
- Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wisata Berbasis Sungai
- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2013-2023
- Surat Keputusan Walikota Nomor 460 Tahun 2015 tentang penetapan lokasi permukiman kumuh Kota Banjarmasin
- Ii, B. A. B., & Permukiman, P. (2000). *Permukiman Kumuh*. 21–42.
- MARGAYANINGSIH, D. I. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan. *Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan*, 9(1), 158–190.
- Prasetyo, A. (2009). Karakteristik Permukiman Kumuh di Kampung Krajan Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta. In *Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Hikon, W, M, L. (2019). Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Mengubah Permukiman Kumuh menjadi Destinasi Wisata. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Mengubah Permukiman Kumuh menjadi Destinasi Wisata*, 8(3) 108-113.
- Rahman dkk. (2019). Konsep Penataan Permukiman Kumuh Tepian Sungai di Kelurahan Sungai Bilu Kota Banjarmasin. *Konsep Penataan Permukiman Kumuh Tepian Sungai di Kelurahan Sungai Bilu Kota Banjarmasin*, 15(3), 397-414.
- Widiastuti, R, N. & Yuwono, T. (2018). Inovasi Kampung Tematik di Kota Semarang, Pembangunan Kawasan Kumuh Berbasis Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi kasus: Kampung Sehat Ramah Anak).
- <https://economy.okezone.com/read/2017/09/05/470/1769577/masih-ada-90-kawasan-kumuh-di-indonesia-kementerian-pupr-masalahnya-komunikasi-tidak-lancar> (24 Oktober 2020)
- <https://umum.banjarmasinkota.go.id/2017/01/profil-kota-banjarmasin.html> (26 Oktober 2020)
- <https://kalsel.antarane.ws.com/berita/194318/banjarmasin-evaluasi-data-kawasan-kumuh-untuk-lanjutan-program-kotaku> (27 Oktober 2020)